

MAKALAH DISKUSI

COVID-

Ketimpangan dan Demokrasi

Studi tentang Lima Demokrasi Besar

Joshua Kurlantzick

Maret 2021

Council on Foreign Relations (CFR) adalah organisasi keanggotaan independen, nonpartisan, kelompok cendekiawan, dan penerbit yang didedikasikan untuk menjadi narasumber bagi anggotanya, pejabat pemerintah, eksekutif bisnis, jurnalis, pendidik dan pelajar, pemimpin sipil dan agama, dan warga lainnya yang tertarik untuk membantu mereka lebih memahami dunia dan pilihan kebijakan luar negeri yang dihadapi Amerika Serikat dan negara lain. Didirikan pada tahun 1921, CFR menjalankan misinya dengan mempertahankan keanggotaan yang beragam, termasuk program khusus untuk mempromosikan minat dan mengembangkan keahlian bagi generasi pemimpin kebijakan luar negeri di masa mendatang; mengadakan pertemuan di kantor pusatnya di New York dan di Washington, DC, dan kota-kota lain tempat pejabat pemerintah senior, anggota Kongres, pemimpin global, dan pemikir terkemuka datang bersama-sama dengan anggota CFR untuk mendiskusikan dan memperdebatkan masalah internasional utama; mendukung Program Studi yang mendorong penelitian independen, memungkinkan para cendekiawan CFR untuk membuat artikel, laporan, dan buku dan mengadakan diskusi meja bundar yang menganalisis isu-isu kebijakan luar negeri dan membuat rekomendasi kebijakan yang konkret; menerbitkan *Foreign Affairs*, jurnal terkemuka tentang urusan internasional dan kebijakan luar negeri A.S.; mensponsori Satuan Tugas Independen yang menghasilkan laporan dengan temuan dan petunjuk kebijakan tentang topik kebijakan luar negeri yang paling penting; dan menyediakan informasi serta analisis terkini tentang peristiwa dunia dan kebijakan luar negeri Amerika di situs webnya, CFR.org.

Council on Foreign Relations tidak mengambil posisi kelembagaan dalam masalah kebijakan dan tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah A.S. Semua pandangan yang diungkapkan dalam publikasinya dan di situs webnya adalah tanggung jawab sepenuhnya dari penulis atau para penulis.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang CFR atau makalah ini, silakan tulis surat ke Council on Foreign Relations, 58 East 68th Street, New York, NY 10065, atau hubungi kantor Komunikasi di 212.434.9888. Kunjungi situs web CFR, CFR.org.

Hak cipta © 2021 oleh the Council on Foreign Relations®, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Makalah ini tidak boleh direproduksi secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apa pun di luar reproduksi yang diizinkan oleh Pasal 107 dan 108 Undang-Undang Hak Cipta A.S. (17 U.S.C. Pasal 107 dan 108) dan kutipan dari peninjau untuk pers publik, tanpa izin tertulis secara tersurat dari Council on Foreign Relations.

Makalah ini dimungkinkan dengan dukungan murah hati dari Henry Luce Foundation.

Pendahuluan

Pandemi virus korona telah mendatangkan malapetaka pada kesehatan masyarakat di sebagian besar negara. Namun, virus ini telah menyebabkan kehancuran tertentu di lima negara demokrasi terpadat dan kuat di dunia: Amerika Serikat, Brasil, India, Indonesia, dan Filipina. Kelimanya merupakan negara dengan jumlah kematian dan beban kasus tertinggi dari COVID-19 di seluruh dunia, dan telah mengalami kesulitan untuk mengendalikan pandemi.¹ Demokrasi bukanlah alasan kegagalan sistem kesehatan masyarakat mereka. Negara demokrasi lain, mulai negara terkonsolidasi dan kaya seperti Jerman dan Taiwan hingga negara yang goyah secara politik dan berpenghasilan menengah seperti Thailand, telah mengembangkan tanggapan efektif yang meminimalkan jumlah korban akibat virus.² Beberapa negara demokrasi, seperti Australia dan Kanada, tidak hanya menghasilkan tanggapan kesehatan masyarakat yang efektif tetapi juga mengambil langkah yang kuat dalam menanggulangi efek pandemi pada ketimpangan.³ Beberapa negara otoriter, seperti Vietnam, telah mengadopsi kebijakan yang membatasi penyebaran virus; beberapa negara otoriter lainnya, termasuk Iran dan Rusia, telah gagal dalam menangani pandemi.⁴

Sebaliknya, tingginya ketimpangan sosial dan ekonomi di lima negara dengan beragam etnis dan ras ini telah membuat pandemi lebih sulit dikendalikan. Negara-negara ini telah gagal menangani virus korona sebagian karena mereka tidak pernah mengatasi perpecahan internal historis mereka, yang secara kasar telah diungkapkan oleh COVID-19. Selain itu, para pemimpin di sejumlah negara ini yang telah menyerang sistem politik dan kohesi sosial telah menghambat tanggapan terhadap pandemi.⁵

Selain menyibak adanya ketimpangan dan menghancurkan sistem kesehatan masyarakat, pandemi memiliki dua efek berbahaya di semua negara berikut: COVID-19 sebenarnya telah memperburuk ketimpangan sosial ekonomi, mungkin untuk beberapa tahun mendatang, dan secara signifikan mempertajam kemunduran demokrasi. Di lima negara ini, beban kasus dan kematian akibat virus korona baru paling banyak menimpa ras, etnis, dan terkadang agama minoritas serta orang miskin; masyarakat miskin dan minoritas secara signifikan saling tumpang tindih, dan banyak pula dari mereka yang memiliki kondisi kesehatan bawaan sehingga lebih rentan mengalami sakit parah atau kritis akibat COVID-19.⁶ Tampaknya, pandemi memperkuat ketimpangan ekonomi dan sosial. Beberapa pemimpin pun mengambil sejumlah langkah era pandemi yang semakin merugikan kelompok miskin dan minoritas.⁷ Lebih lanjut, seperti yang kerap terjadi selama keadaan darurat besar sebelumnya, para pemimpin politik memanfaatkan kondisi genting tersebut untuk merusak norma dan lembaga demokrasi—di lima negara demokrasi ini dan di seluruh dunia.⁸

Layaknya berbagai krisis yang terjadi sebelumnya, pandemi virus korona pada saat bersamaan telah menyebabkan kerusakan ini dan menawarkan kesempatan bagi masyarakat untuk bahu-membahu dan berpikir terbuka tentang kemungkinan reformasi kebijakan. Beberapa politikus mendapati bahwa menggalakkan reformasi kebijakan utama setelah terjadinya pandemi yang meluluhlantakkan negara dapat mendongkrak popularitas mereka dan meraih dukungan dalam kursi politik; di sejumlah negara demokrasi yang lebih kecil, seperti Selandia Baru, politikus yang menjaga kesatuan dan kesetaraan sosial serta merangkul reformasi besar selama pandemi berhasil meraih kemenangan pada pemilihan umum.⁹ Kendati tidak semua solusi dapat diterapkan di lima negara demokrasi ini, pembuat kebijakan dapat memanfaatkan

keadaan darurat pandemi untuk menggalakkan reformasi struktural berskala besar guna membalikkan kemunduran demokratis dan mengatasi aspek ketimpangan sosial ekonomi. Karena kelima negara ini merupakan negara demokrasi terbesar dan terkuat di dunia, setiap langkah yang mereka ambil untuk mengatasi ketimpangan dan memerangi kemunduran demokrasi akan menjadi contoh bagi negara lain di seluruh dunia. Akan tetapi, jika mereka membiarkan COVID-19 memperburuk ketimpangan dan mempercepat kemunduran demokrasi, hal ini juga akan menjadi contoh bagi negara lain.

Negara Demokrasi Besar, Masalah Besar

Meskipun mereka memiliki sejarah yang sangat beragam—dan Amerika Serikat serta India memiliki tradisi demokrasi yang lebih lama daripada tiga negara lainnya—Amerika Serikat, Brasil, India, Indonesia, dan Filipina dianggap sebagai negara demokrasi yang stabil pada awal tahun 2010-an. Kelima negara tersebut telah menyelenggarakan beberapa pemilihan yang bebas dan adil dan menikmati peralihan kekuasaan secara damai ke politikus oposisi.¹⁰ Namun demikian, kendati situasinya relatif stabil, negara demokrasi besar ini juga memiliki tingkat ketimpangan sosial ekonomi yang tinggi—dan pemimpin saat ini yang menolak sistem politik mereka. Setelah membandingkan tanggapan ketiga negara ini terhadap pandemi virus korona yang melanda, ada sejumlah pelajaran umum dan menarik yang dapat ditarik.

Faktor historis yang menghubungkan ketimpangan penghasilan dan minoritas tidak sama persis di masing-masing negara ini. Sejarah perbudakan Amerika Serikat dan Brasil masih membentuk masyarakat dan ekonomi, sementara sistem kasta India dan aturan kolonial lama melahirkan ketimpangan dan perpecahan. Filipina mempertahankan warisan konsentrasi kekayaan yang berasal dari era kolonialisme Spanyol; mengikuti aturan Spanyol, sekelompok kecil elite Filipina mendominasi perekonomian negara ini.¹¹ Di Indonesia, pemerintahan diktator Soeharto menciptakan pertumbuhan yang konsisten dan kuat serta memupuk kesetaraan ekonomi, namun juga melahirkan monopoli kleptokratis di berbagai industri. Di era pasca-Soeharto, monopoli tersebut mendominasi berbagai sektor ekonomi, dan ketimpangan pun melambung tinggi.¹²

Saat ini, mereka mengalami masalah ketimpangan yang cukup besar. Amerika Serikat adalah negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi paling tinggi di antara tujuh negara berkembang di Group of Seven. Brasil adalah salah satu negara yang dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi di Amerika Latin, terlepas dari upaya suksesi pemerintah Brasil untuk menggunakan bantuan tunai dan program lain demi memerangi ketimpangan, dan Filipina juga memiliki ketimpangan pendapatan yang tinggi.¹³ Baik Indonesia maupun India sama-sama menghadapi ketimpangan pendapatan yang meningkat tajam.¹⁴ Di negara yang beragam ini, etnis, agama, dan ras minoritas selalu menjadi bagian dari warga miskin dan kerap kali menderita karena harapan hidup yang lebih rendah, akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan yang lebih sedikit, dan tingkat penahanan yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang dari kelompok mayoritas.

Sebelum COVID-19 muncul, banyak pemimpin politik di negara-negara ini mengambil langkah yang justru memperdalam jurang ketimpangan, dan pada akhirnya menjadikan tanggapan terhadap pandemi kian sulit dilakukan. Pemerintahan Donald J. Trump misalnya, berulang kali berupaya melemahkan Affordable Care Act (ACA), yang telah membantu memperluas akses ke asuransi kesehatan, terutama di kalangan minoritas dan penduduk miskin. (Keputusan Pengadilan Tertinggi tentang kasus ini akan dirilis pada tahun 2021.) Pembatalan ACA akan membuat lebih dari dua puluh satu juta warga Amerika yang sebagian besar berpenghasilan rendah kehilangan asuransi kesehatan.¹⁵ Pemerintahan Trump juga mengambil pendekatan garis keras terhadap pemolisian dan hak suara, menolak untuk mendukung reformasi kepolisian, dan berusaha mengacaukan hak suara dengan berbagai cara. Dampak penindasan pemilih ini begitu besar bagi masyarakat miskin dan minoritas.¹⁶ Di Filipina, “perang” pemerintah Rodrigo Duterte terhadap narkoba, yang sebagian besar terdiri dari pembunuhan di luar hukum yang disetujui negara, telah memakan begitu banyak korban bagi masyarakat miskin Filipina. Meskipun Duterte telah menegaskan bahwa “perang” narkoba akan menargetkan pengedar narkoba kelas berat, sebuah studi komprehensif oleh Amnesty International menemukan bahwa “perang” tersebut secara tidak proporsional menargetkan warga miskin dan menyebutnya sebagai “upaya pembunuhan berskala besar”.¹⁷

Para pemimpin terkini di negara demokrasi besar ini juga menggunakan retorika publik untuk memecah belah dan mempolarisasi masyarakat, yang sering kali merugikan kelompok minoritas. Di Twitter, Presiden Trump kerap berujar bahwa politikus dengan kulit non-putih seperti kandidat gubernur Georgia Stacey Abrams dan Perwakilan New York Alexandria Ocasio-Cortez tidak memenuhi syarat untuk menjabat dan harus dihindari; ia pun tak jarang menjelekkan imigran Amerika Latin dan minoritas lainnya dan menyebutkan bahwa mereka berbahaya bagi Amerika Serikat.¹⁸ Presiden Brasil Jair Bolsonaro mengungkapkan bahwa penduduk asli Brasil sekarang “telah berkembang [menjadi] manusia” dan menyayangkan bahwa kavaleri Brasil tidak memusnahkan lebih banyak masyarakat asli selama penaklukan di aman Brasil.¹⁹ Demonisasi Bolsonaro terhadap penduduk asli dan pengusiran perlindungan untuk Hutan Hujan Amazon telah berkontribusi terhadap gelombang penambangan dan penghijauan ilegal serta lonjakan kekerasan terhadap warga asli di lembah sungai Amazon.²⁰ Beberapa pengikut terdekat Perdana Menteri India Narendra Modi, termasuk Yogi Adityanath, kepala menteri negara bagian besar Uttar Pradesh, menyebut komunitas Muslim India yang terdiri dari sekitar dua ratus juta orang sebagai “virus” di negara ini.²¹ Kecaman terhadap Muslim oleh anggota terkemuka partai Modi serta kegagalan pemerintahan Modi untuk mengendalikan kekerasan anti-Muslim telah menimbulkan peningkatan gelombang kejahatan rasial anti-Muslim.²²

Ketimpangan Menghambat Upaya Melawan COVID-19

Ketimpangan ekonomi dan sosial yang begitu parah di Amerika Serikat, Brasil, India, Indonesia, dan Filipina telah menghambat tanggapan mereka terhadap pandemi. Karena banyak dari negara demokratis tersebut memiliki sistem perawatan kesehatan yang tidak berfungsi efektif bagi orang-orang berpenghasilan rendah, termasuk minoritas, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dengan cepat menjadi kewalahan ketika virus menyebar ke daerah yang lebih miskin di negara tersebut—di mana orang-orang lebih mungkin untuk tertular COVID-19 karena tidak dapat bekerja dari jarak jauh. Di berbagai tempat seperti Midwest bagian atas pedesaan Amerika Serikat, sejumlah kota dalam Brasil atau provinsi miskin Amazonas, dan lingkungan termiskin di India, rumah sakit yang kewalahan dan pengaturan layanan kesehatan lainnya tidak dapat menahan laju virus, yang memungkinkan COVID-19 menyebar lebih cepat. Siklus tersebut kemudian berulang, dan, karena warga yang berpenghasilan rendah tidak tinggal di satu daerah—di India, misalnya, orang miskin telah bermigrasi ke seluruh negeri sejak COVID-19 menyerang, mereka berupaya mencari pekerjaan—mereka pun lalu menyebarkan virus dan menghambat berbagai upaya tanggapan nasional.

Kebijakan yang memperdalam ketimpangan sering kali memperburuk situasi. Misalnya, kampanye pemerintahan Trump melawan ACA dan penolakan beberapa negara bagian yang dipimpin oleh Partai Republik untuk memperluas Medicaid agar warga yang lebih miskin dapat mengakses ACA, membuat jumlah penduduk Amerika yang tidak diasuransikan tetap tinggi dan menghambat upaya tanggapan terhadap pandemi.²³ Kurang umumnya cuti sakit di Amerika Serikat, Brasil, India, Indonesia, dan Filipina untuk pekerja berpenghasilan rendah, yang kerap bekerja di sektor informal, menyiratkan arti bahwa, selama pandemi, pria dan wanita dari golongan yang lebih miskin sering kali tetap bekerja bahkan ketika mereka tahu bahwa mereka mungkin telah terinfeksi, karena mereka tidak bisa kehilangan pekerjaan.²⁴

Ketimpangan historis juga menghambat peluncuran vaksin di berbagai negara ini, meskipun kampanye vaksinasi sekarang menjadi senjata terbaik untuk mengendalikan pandemi. Banyak populasi minoritas di Amerika Serikat memendam ketidakpercayaan yang mendalam terhadap upaya kesehatan masyarakat dari pemerintah, karena dampak rasisme sistemis yang bertahan lama dan sejarah pemerintah A.S. yang melakukan eksperimen ilegal pada minoritas (seperti studi Tuskegee, di mana pengobatan untuk laki-laki kulit hitam yang menderita sifilis ditolak untuk mempelajari efek penyakitnya) dan menunjukkan ketidaktertarikan pada masalah yang merusak kesehatan masyarakat minoritas (seperti krisis air di Flint, Michigan). Sebuah studi tentang pandangan vaksinasi yang dilakukan oleh Kaiser Family Foundation menunjukkan skeptisisme besar terhadap vaksin COVID-19 di antara warga kulit hitam Amerika, dengan hampir 50 persen mengatakan mereka tidak mau divaksin “bahkan jika para ilmuwan menganggapnya aman dan tersedia secara gratis untuk siapa pun yang menginginkannya”.²⁵ Sebuah studi yang dilakukan oleh Pew Research Center menyebutkan tingkat skeptisisme vaksin yang sama tingginya di antara orang kulit hitam dan Amerika Latin.²⁶ Ketidakpercayaan semacam ini mempersulit proses vaksinasi untuk cukup banyak orang demi mencapai kekebalan kelompok.

Sekalipun kelompok minoritas di Amerika Serikat ingin mendapatkan vaksinasi, peluncuran vaksin AS yang kacau, terdesentralisasi, dan sering kali berpusat pada internet sering kali mempermudah orang Amerika kulit putih yang lebih kaya untuk membuat janji temu dan mendapatkan vaksin. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang kulit hitam Amerika mendapatkan vaksinasi pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada orang kulit putih Amerika, meskipun secara proporsional, populasi kulit hitam yang terserang COVID-19 jauh lebih tinggi, dan bahkan di lingkungan yang lebih miskin dan didominasi

minoritas, persentase vaksin yang tinggi juga terjadi pada orang kulit putih, orang Amerika yang lebih kaya (sering kali dari wilayah lain), yang memiliki mobil, akses internet, dan waktu untuk melakukan perjalanan ke lingkungan yang lebih miskin dan mendaftar untuk vaksinasi.²⁷ Proses vaksinasi yang kurang adil ini mengacaukan seluruh upaya pemberian vaksin karena Amerika Serikat membutuhkan banyak sekali warga Amerika, termasuk kaum minoritas, yang harus divaksin guna meningkatkan kekebalan kelompok.

Para pemimpin politik saat ini di Amerika Serikat, Brasil, India, Indonesia, dan Filipina—yang semuanya berkuasa sebagai politikus antisistem dan kerap meremehkan pakar, termasuk ahli epidemiologi dan spesialis penyakit menular—juga memperkeruh upaya tanggapan terhadap pandemi. Trump, misalnya, berulang kali mengejek konsensus ilmiah tentang langkah-langkah efektif dalam mengendalikan pandemi, menambah kekacauan dan kebingungan dalam upaya tanggapan dan mempolarisasi publik dengan cara yang mempersulit pengembangan kampanye kesehatan masyarakat anti-COVID-19.²⁸ Bolsonaro juga telah merendahkan pakar ilmiah selama pandemi, menentang tanggapan, dan mengacaukan upaya kesehatan masyarakat. Trump, Bolsonaro, Duterte, dan Presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, telah mempromosikan pengobatan yang belum terbukti untuk COVID-19, seperti pengobatan herbal dan obat antimalaria *hydroxychloroquine*, dan terkadang mengolok-olok konsensus ilmiah tentang cara mengatasi pandemi.²⁹ Bolsonaro terus mengejek upaya pemberian vaksin, dengan mengatakan bahwa dirinya tidak akan divaksin—sebuah pesan presiden yang akan menghambat kemajuan vaksinasi di negara yang secara historis dikenal dengan kampanye kesehatan masyarakat yang efektif melawan penyakit seperti virus Zika.³⁰ Sejatinya, jumlah orang Brasil yang mengatakan mereka tidak akan divaksinasi, yang hampir pasti dipengaruhi oleh skeptisisme vaksin Bolsonaro, meningkat lebih dari dua kali lipat dalam enam bulan terakhir pada tahun 2020.³¹

Pandemi Menampakkan Sisi Buruk dan Memperparah Masalah

Pandemi kian mengungkap disfungsi di lima negara demokrasi padat penduduk dan kuat ini. Hal ini telah memperkuat ketimpangan ekonomi dan sosial serta mempercepat kemunduran demokrasi.

COVID-19 MEMPERKUAT KETIMPANGAN

Pidato dan kebijakan lima pemimpin baru-baru ini, di samping sejarah ketimpangan negara mereka, menyuarakan bahwa pandemi memberi dampak yang lebih berat kepada kaum minoritas dan warga miskin dibandingkan dengan warga kelas menengah, atas, dan warga mayoritas ras, agama, dan etnis. COVID-19 telah memperdalam ketimpangan di negara-negara ini dalam banyak hal.

Pandemi memperkuat ketimpangan dalam berbagai hal. Hanya dengan membunuh warga miskin dan minoritas per kapita di negara-negara ini, COVID-19, bersama dengan manajemen pandemi negara yang tidak efektif, telah menghancurkan keluarga kurang mampu dan minoritas, membiarkan mereka dengan penghasil upah potensial yang lebih sedikit untuk masa depan dan mempersulit keuangan mereka dibandingkan dengan rekan yang lebih kaya—yang kebanyakan memiliki asuransi yang lebih baik—ketika berhadapan dengan biaya perawatan kesehatan selama pandemi. Jumlah kematian per kapita warga miskin lebih tinggi dibandingkan dengan warga kelas atas di seluruh negara-negara ini.³² Salah satu contohnya, reservasi Indian Amerika telah mengalami wabah dan jumlah kematian COVID-19 terparah, sebagian disebabkan karena kurangnya pendanaan selama beberapa dekade oleh pemerintah federal, serta karena pemerintahan Trump selama berbulan-bulan yang tidak menyertakan suku Indian Amerika dalam Undang-Undang Pertolongan dan Bantuan Virus Corona, serta Keamanan Ekonomi (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security/CARES), rancangan undang-undang stimulus terkait COVID utama.³³

Kebijakan pemimpin telah memperburuk beragam penderitaan akibat pandemi dengan efek yang bertahan lama. Pemerintah Bolsonaro membubarkan Kementerian Kota, yang seharusnya dapat membantu memberikan bantuan terkait COVID-19 pada bagian termiskin di wilayah perkotaan Brasil. Pemerintah juga tidak memberikan cukup bantuan terhadap sistem kesehatan masyarakat Brasil yang terpuruk, yang pada umumnya melayani warga kurang mampu (sementara itu, penduduk Brasil yang mampu menggunakan penyedia layanan kesehatan swasta).³⁴

Kelaparan yang disebabkan oleh pandemi juga menguatkan ketimpangan—ini mempersulit anak-anak untuk belajar dan berdampak pada masalah kesehatan jangka panjang. Keluarga Kulit Hitam dan Latin di Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan memberi makan keluarga mereka selama pandemi dibandingkan dengan keluarga kulit putih.³⁵

PASAR TENAGA KERJA

Efek virus korona terhadap pasar tenaga kerja memiliki dampak jangka panjang terhadap ketimpangan sosial ekonomi. Banyak krisis ekonomi sebelumnya, seperti Resesi Hebat 2008–09, meninggalkan dampak jangka panjang yang memperlebar ketimpangan selama sepuluh tahun setelahnya. Kini, di tengah meningkatnya pengangguran terkait pandemi, hilangnya pekerjaan terbesar berpusat pada industri upah kecil yang kebanyakan mempekerjakan kaum minoritas dan kurang mampu—industri yang pada umumnya lebih rentan terhadap risiko kesehatan dibandingkan dengan industri dengan pekerja Amerika bergaji

tinggi.³⁶ Bisnis kecil A.S. yang dimiliki minoritas menderita kerugian ekonomi yang tidak proporsional selama pandemi, sebagian disebabkan karena mereka secara finansial memang belum aman dibandingkan dengan bisnis yang dimiliki warga kulit putih, dan sisanya disebabkan oleh rencana pemerintah federal untuk membantu bisnis kecil lebih membantu perusahaan besar alih-alih firma kecil.³⁷ Para perempuan juga mengalami kesulitan yang tak kalah besar karena sering kali kewalahan dengan perawatan anak ketika sekolah ditutup. Secara keseluruhan, sebuah studi yang dilakukan oleh *Washington Post* tentang resesi disebabkan oleh COVID-19 membeberkan bahwa ini adalah resesi yang paling tidak adil dalam sejarah A.S. modern, “memberikan kemunduran ringan bagi mereka yang berada atau di dekat puncak dan pukulan yang menyengsarakan bagi mereka yang berada di bawah, berdasarkan analisis *Washington Post* tentang hilangnya pekerjaan di sepanjang spektrum pendapatan”.³⁸ Dengan adanya perbedaan ini, hilangnya pekerjaan di Amerika Serikat kemungkinan besar akan bertahan lama bagi pekerja upah kecil dan industri layanan dibandingkan dengan industri gaji besar, di mana pekerja dapat dengan mudah beralih ke bekerja jarak jauh dan kemungkinan besar untuk segera pulih setelah pandemi berakhir.

Kisah pasar tenaga kerja di empat negara demokrasi besar lain tidak jauh berbeda. Semua negara demokrasi besar ini mengalami kerugian fantastis dalam keluaran ekonomi pada 2020. Filipina mengalami penurunan ekonomi terbesar yang pernah tercatat, Indonesia mengalami penurunan pertamanya dalam dua dekade, dan ekonomi India merosot hampir 10 persen tahun lalu.³⁹ Secara keseluruhan, Bank Dunia memperkirakan bahwa pandemi akan mendorong 150 juta jiwa di dunia ke arah kemiskinan pada 2021, dan pandemi sebelumnya memperkirakan bahwa COVID-19 akan memiliki dampak ekonomi yang tidak dapat segera dipulihkan.⁴⁰ Meskipun lima negara demokrasi besar ini tidak termasuk dalam negara termiskin di dunia, dengan dasar produk domestik bruto (PDB) per kapita, penurunan ekonomi yang berkepanjangan yang dibarengi dengan konsentrasi kehilangan pekerjaan di sektor yang didominasi oleh minoritas dan warga miskin akan berdampak negatif terhadap prospek pekerjaan, pendapatan, dan kesehatan dari kalangan ini ke depannya.

Di Brasil contohnya, di mana jumlah pengangguran sebelum dimulainya pandemi sudah cukup tinggi, penelitian menunjukkan bahwa COVID-19 dapat memiliki efek jangka panjang pada ketenagakerjaan dan kemiskinan jika pembuat kebijakan tidak mengatasi kondisi kejatuhan ini dengan program ekonomi yang substansial.⁴¹ COVID-19 membuat 83 persen penduduk Brasil ragu akan kemampuan mereka untuk bekerja—keraguan berat yang menyerang penduduk Brasil yang kurang mampu.⁴² Tak jauh berbeda, di India, pandemi dapat menyebabkan dislokasi ekonomi bagi penduduk India yang kurang mampu selama bertahun-tahun. Banyak penduduk India yang pindah dari wilayah pedesaan ke kota besar demi mencari pekerjaan dalam dekade terkini. Selama pandemi, pekerja migran ini sering kali menjadi yang pertama yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan berbondong-bondong kembali ke kampung halaman, namun mereka tidak dapat menemukan pekerjaan yang stabil di wilayah pedesaan dengan sedikit lapangan kerja dan menghadapi kendala struktural dan kekeringan yang sering terjadi.⁴³

Selain itu, pemimpin politik di banyak negara demokrasi ini telah mengambinghitamkan warga kurang mampu dan minoritas selama COVID-19, yang menimbulkan cedera fisik langsung dan berpotensi menjadikan perusahaan enggan merekrut mereka, menghalangi prospek ekonomi warga miskin dan kelompok minoritas. Di India contohnya, politikus terkemuka di partai penguasa Modi telah mencetuskan teori konspirasi dan menyalahkan orang Muslim karena menyebarkan COVID-19 tanpa adanya bukti.⁴⁴ Teori konspirasi yang terpolarisasi ini memiliki konsekuensi: teori ini nyaris menyebabkan lonjakan serangan pada warga Muslim di India dan dapat mendorong banyak warga Muslim keluar dari sektor informal ekonomi, membuat mereka kehilangan pekerjaan dan pendapatan.⁴⁵ Kemungkinan besar mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan kembali karena seluruh perekonomian India tengah mengalami krisis; India mengalami satu dari penurunan ekonomi besar terparah, memaksa ratusan juta jiwa jatuh ke jurang kemiskinan.⁴⁶

KEKAYAAN DAN ASET

Pandemi ini juga akan memperburuk ketimpangan dalam hal pemegang kendali kekayaan dan aset di Amerika Serikat. Karena warga miskin dan minoritas di Amerika Serikat telah mengendalikan kekayaan dan aset yang lebih sedikit daripada warga Amerika kulit putih yang lebih kaya, jurang berkelanjutan terhadap pasar tenaga kerja ini lebih lanjut akan memperlebar ketimpangan kekayaan. Indeks pasar saham A.S., sumber kekayaan penting bagi penduduk Amerika kelas menengah dan atas, telah pulih dari posisi rendah pandeminya, namun kebanyakan penduduk Amerika berpendapatan rendah hampir tidak memiliki saham—studi oleh Federal Reserve menunjukkan bahwa hanya sepertiga dari 50 persen penduduk Amerika termiskin yang memiliki saham.⁴⁷ Sementara itu, pandemi menghabiskan kekayaan dan aset penduduk Amerika kelas menengah ke bawah, dan mereka memperoleh sedikit keuntungan dari naiknya pasar saham. Kelompok kurang mampu dan minoritas di Amerika Serikat juga kemungkinan besar akan kehilangan rumah mereka selama pandemi, mengambil hal yang sering kali menjadi aset paling berharga mereka.⁴⁸

PENDIDIKAN DAN ANAK-ANAK

Sementara itu, anak-anak kurang mampu mengalami penderitaan terburuk dari peralihan ke sekolah jarak jauh di Amerika Serikat dan beberapa di negara demokrasi besar lain; efek dramatis dari pandemi terhadap pendidikan lebih lanjut akan memperdalam ketimpangan di negara ini, merugikan anak-anak dari golongan miskin sepanjang hidup mereka. Sekitar setengah dari seluruh anak-anak Amerika masih menjalani sekolah jarak jauh, yang terbukti kurang efektif dibandingkan pembelajaran langsung, khususnya bagi anak-anak kurang mampu dengan akses komputer dan internet terbatas, serta orang tua yang tidak memiliki pekerjaan yang memungkinkan mereka bekerja dari rumah dan memantau pembelajaran jarak jauh. Sementara itu, negara demokrasi yang lebih kaya, lebih setara, dan berjalan lebih baik, seperti di Australia, Selandia Baru, dan Eropa menyediakan pembelajaran langsung dibandingkan Amerika Serikat dan pada umumnya menemukan cara untuk membuat pembelajaran langsung lebih aman.⁴⁹

Persentase anak-anak Amerika kurang mampu yang belajar jarak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak dari golongan lebih berada, yang orang tuanya dapat membayar agar mereka dapat belajar di sekolah swasta secara langsung, menyewa guru les, atau mengambil langkah lain untuk menciptakan pembelajaran langsung, dan perbedaan ini akan menciptakan dampak seumur hidup.⁵⁰ Studi yang dilaksanakan oleh McKinsey & Company menemukan bahwa beberapa siswa dari keluarga berpendapatan rendah akan tertinggal selama kurang lebih setahun pembelajaran dibandingkan rekannya akibat dampak COVID-19 dan sekolah yang ditutup.⁵¹ Kesenjangan pendidikan antara anak-anak kurang mampu yang bersekolah jarak jauh dengan anak-anak mampu yang menghadiri sekolah langsung akan secara permanen menghambat pendapatan anak-anak kurang mampu setelah mereka dewasa.⁵²

Di India, Indonesia, dan Filipina, dan negara berkembang lainnya, sekolah jarak jauh kurang efektif, terutama bagi anak-anak kurang mampu, yang kebanyakan tidak memiliki akses internet sama sekali.⁵³ Studi yang dilaksanakan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa 1,6 miliar anak, sebagian besar tinggal di negara berkembang, mengalami penutupan sekolah akibat COVID-19.⁵⁴ Di negara berkembang ini, periode era pandemi di mana anak-anak dari keluarga miskin tidak memperoleh instruksi apa pun dapat merusak penghasilan seumur hidup mereka lebih parah dibandingkan dengan anak-anak kurang mampu di Amerika Serikat.

COVID-19 MENUMBUHKAN KEMUNDURAN DEMOKRASI

Pemimpin terkini dari negara demokrasi besar ini, seperti halnya rekan mereka di era COVID-19, telah menggunakan pandemi untuk memperluas kekuasaan eksekutif mereka. Lima sosok ini memiliki sifat yang berbeda terkait iliberalisme mereka dan cara mereka menggunakan pandemi untuk lebih lanjut memusatkan kekuasaan mereka. Dari Duterte, yang memantau langkah darurat yang hampir mendekati otoritarianisme, hingga Jokowi, satu dari lima pemimpin yang paling enggan untuk melakukan kompromi terhadap norma demokrasi. Dan masing-masing dampak pemimpin terhadap demokrasi telah dibatasi oleh kekuatan—atau kelemahan—dari lembaga negaranya. Norma dan lembaga lebih sulit untuk dirongrong bagi Trump, Modi, dan Bolsonaro dibandingkan Duterte; Amerika Serikat dan India memiliki tradisi demokrasi yang lebih lama dan pertahanan politik yang lebih kuat, dan pengadilan serta kongres Brasil terkadang menghalangi Bolsonaro.

Meskipun demikian, kelima pemimpin telah menyerang sejumlah lembaga, seperti kehakiman, birokrasi, masyarakat sipil, aparat pemilu, dan media independen. Pemerintah ini sering kali meningkatkan serangan terhadap norma dan lembaga selama pandemi, ketika kelompok masyarakat sipil mengalami lebih banyak kesulitan mengadakan demonstrasi dan penduduknya terganggu oleh ketakutan mereka (yang wajar) akan kesehatan dan keluarga mereka. Duterte telah menutup saluran penyiaran, seperti penyiaran Filipina ABS-CBN, dan sekutunya di badan legislatif Filipina telah memberikan kekuasaan darurat yang besar kepada presiden mereka, yang tampaknya untuk melawan virus korona baru. Di bawah hukum baru, pemerintah memiliki otoritas untuk meringkus penduduk tanpa surat perintah.⁵⁵ Pemerintahan Modi telah memolitisasi pengadilan India dan menggunakan virus korona untuk lebih lanjut menekan media India, yang berada dalam tekanan partai Modi dan bisnis yang memihak perdana menteri.⁵⁶

Sementara itu, pemerintahan Trump menggalakkan kampanyenya melawan jenderal inspektur independen dalam lembaga pemerintahan selama pandemi dan secara bertahap mempertahankan pimpinan kabinet tanpa persetujuan kongres dan melanggar hukum, di samping upaya lain.⁵⁷ (Pemerintahan Joe Biden baru berjanji untuk memulihkan lembaga dan norma, namun apakah pemerintahan baru ini dapat memperbaiki kerusakan masih belum diketahui.) Meskipun tidak seliberal yang lain, Jokowi telah memantau tindakan keras pada kritik masyarakat sipil terhadap pemerintah, yang diungkapkan sebagai pencegahan kritik terhadap tanggapan COVID-19 pemerintah. Pemerintahan Jokowi juga telah menghidupkan kembali penggunaan angkatan bersenjata dalam urusan domestik, termasuk dalam pertempuran pandemi, meningkatkan rasa takut terhadap otoritarianisme di negara yang, selama kediktatoran lama Soeharto, memainkan peran utama, dan sering kali peran yang brutal, dalam politik domestik.⁵⁸ Pemerintahan Jokowi lebih lanjut membentuk kekuasaan darurat selama pandemi yang telah mengurangi kemandirian pemerintahan setempat dan regional.⁵⁹

Lima demokrasi besar ini adalah simbol tren yang lebih besar, karena pandemi telah menyebabkan kemunduran demokrasi hampir di seluruh dunia. Namun, arah negara-negara ini mengusung beban khusus secara regional dan internasional karena mereka memimpin demokrasi terbesar di dunia. Studi tahun 2020 oleh Freedom House menunjukkan bahwa pandemi telah “meningkatkan krisis demokrasi di seluruh dunia, memberikan perlindungan bagi pemerintah untuk mengganggu pemilu, membungkam kritik dan media, dan mengacaukan akuntabilitas yang dibutuhkan untuk melindungi hak asasi manusia serta kesehatan masyarakat.” Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi hak dan demokrasi telah memburuk di delapan puluh negara sejak timbulnya pandemi.⁶⁰ Indeks tahunan demokrasi global Economist Intelligence Unit, yang diterbitkan pada Februari, memiliki temuan yang nyaris sama dengan studi milik Freedom House. Temuan tersebut menyatakan bahwa “di seluruh dunia pada 2020, penduduk mengalami pengurangan terbesar dalam kemerdekaan individu yang pernah diambil pemerintah selama masa damai” dan bahwa demokrasi secara global berada di titik terlemahnya sejak indeks diluncurkan pada 2006.⁶¹

Rekonsiliasi dan Reformasi

Terlepas dari semua kesuraman tersebut, sejarah guncangan besar, seperti bencana alam, resesi atau depresi, dan gelombang penyakit sebelumnya menunjukkan bahwa kejadian tersebut, jika ditangani melalui penyusunan kebijakan yang efektif, dapat memupuk rekonsiliasi sosial dan mendorong reformasi politik dan ekonomi yang dramatis. Studi terkini dari Organisasi Dana Abadi Carnegie untuk Perdamaian Internasional menunjukkan bagaimana guncangan, seperti tsunami Samudra India pada 2004 dan bencana nuklir Fukushima pada 2011 di Jepang mendorong rekonsiliasi politik dan sosial.⁶²

Sebaliknya, bukti sejarah yang beragam menunjukkan bahwa ketika keadaan darurat besar ditangani dengan buruk, hal ini dapat meningkatkan rasa tidak percaya kepada pemerintah, sosial, dan polarisasi politik, ketimpangan, dan lahirnya pemimpin otoriter yang tidak liberal. Keadaan darurat masa lampau yang tidak ditangani secara efektif oleh pembuat kebijakan, seperti Depresi Besar, tidak berakhir dengan mulus. Di banyak negara, depresi memupuk polarisasi politik yang kuat, ketidakpuasan massal terhadap demokrasi, penerimaan otoritarianisme, dan pada akhirnya terjadinya konflik dalam negara terbesar dan paling mematikan dalam sejarah umat manusia.

Di beberapa demokrasi kecil, pandemi saat ini telah memercik upaya rekonsiliasi sosial dan politik. Politikus di Kanada, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan Korea Selatan, di antara negara lainnya, telah bersatu untuk mengembangkan strategi dalam menangani COVID-19 dan memanfaatkan ancaman pandemi untuk menangani polarisasi dan menggalakkan kesetaraan. Menggalakkan kesatuan dan menangani ketimpangan telah terbukti populer secara politik, dan politikus pada umumnya mencondongkan diri ke strategi yang membantu menjaga popularitas mereka dan memenangkan pemilihan. Doug Ford, Perdana Menteri Ontario, politikus yang dikenal memolarisasi sebelumnya, telah meraih kepercayaan tingkat tinggi di seluruh partai politik dengan menawarkan kepemimpinan yang jelas dan transparan, serta bekerja dengan pembuat kebijakan dari beragam lini partai selama keadaan darurat.⁶³ Moon Jae-in, Presiden Korea Selatan, memanfaatkan kesatuan nasional negaranya untuk mencoba mengurangi intensitas perpecahan politik sayap kiri dan kanan negara selama mengawasi upaya tanggapan COVID-19 yang efektif. Di Afrika Selatan, Presiden Cyril Ramaphosa dengan sengaja memanfaatkan kesatuan negara yang dipicu oleh COVID-19 untuk menggalakkan rekonsiliasi negara dan memerangi polarisasi serta ketimpangan.⁶⁴ Dan di Selandia Baru, Perdana Menteri Jacinda Ardern telah menggabungkan pendekatan yang efektif untuk mengatasi COVID-19 dengan serangkaian pesan pidato yang menekankan persatuan Selandia Baru. Ia dianugerahi dengan kemenangan pemilihan terbesar dalam sejarah Selandia Baru modern pada Oktober 2020.⁶⁵

Langkah ke Depan

Lima negara demokrasi, yaitu Amerika Serikat, India, Indonesia, dan Filipina dihantui oleh masalah politik, ekonomi, dan sosial yang besar. Tantangan ini diperburuk dengan kepemimpinan yang terpolarisasi dan sering kali kurang mumpuni, baik sebelum dan selama pandemi. Permasalahan yang besar dan pelik menyiratkan makna bahwa hal ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat atau mudah. Daftar ide kemajuan apa pun hanya dapat digunakan sebagai titik loncatan; beberapa pakar politik A.S., misalnya, meyakini bahwa polarisasi politik, ketimpangan sosial ekonomi, dan rusaknya kohesi sosial sangatlah parah sehingga politik negara tersebut tidak dapat diselamatkan dan Amerika Serikat pada dasarnya menjadi tidak dapat diatur.⁶⁶

Tetapi, tata kelola yang efektif menghadirkan keuntungan politik dan kebijakan, bahkan bagi pemimpin yang sangat terpolarisasi. Ini melejitkan popularitas pemimpin, juga mungkin prospek elektabilitas mereka. Sementara itu, dampak serius dari krisis ini menghadirkan peluang bagi pemimpin untuk menangani dengan serius serta mendorong reformasi besar demi menangani tantangan ekonomi dan politik negara ini yang telah menggurita. Banyak dari reformasi ini yang seharusnya menciptakan agenda politik yang berfokus pada hal yang disebut oleh Jacob Hacker dari Yale University sebagai “pradistribusi”—menerapkan langkah yang menangani ketimpangan dan menjadikan pertumbuhan lebih inklusif dari bawah ke atas, selain mengenakan pajak kepada masyarakat.⁶⁷

Secara keseluruhan, pemimpin harus mempertimbangkan langkah reformasi berikut:

Memanfaatkan persatuan singkat yang ditimbulkan oleh COVID-19 demi secara agresif memajukan rekonsiliasi nasional dan kepercayaan publik. Bahkan di lima negara demokrasi besar yang sangat terpolarisasi ini, jajak pendapat menunjukkan bahwa sejumlah besar persentase penduduk ingin mengatasi polarisasi dalam menangani COVID-19—dan mungkin juga melawan masalah ketimpangan yang lebih luas. Sebagai contoh, meski keberpihakan terkait COVID-19 di Amerika Serikat tampak tidak menarik, jajak pendapat mengungkapkan bahwa warga Amerika kebanyakan ingin bekerja sama untuk melawan virus dan bahwa sebagian besar warga Amerika memiliki pandangan yang sama mengenai cara terbaik untuk menangani COVID-19.⁶⁸ Lebih luas lagi, penelitian dari organisasi More in Common menyebutkan bahwa di berbagai negara, “pandemi telah menciptakan rasa kebersamaan yang baru” dan keinginan bersama untuk bekerja sama demi mengatasi masalah serta membangun kembali kepercayaan publik, yang sangat vital bagi fungsi pemerintah, baik selama pandemi ataupun dalam situasi normal.⁶⁹

Pembuat kebijakan di lima negara ini harus memanfaatkan momen ini, dengan menggunakan keinginan sosial untuk bersatu demi memajukan rekonsiliasi nasional dan menekan polarisasi, seperti yang telah dilakukan pemimpin seperti Ramaphosa dan Moon di pemerintahan yang lebih kecil. Pemimpin seperti Bolsonaro atau Modi belum tentu dapat melakukannya. Sejumlah pembuat kebijakan populis di Amerika Serikat, Brasil, dan India telah menggunakan pandemi demi melejitkan polarisasi, sehingga kepercayaan publik pada pemerintah dan segala jenis keahlian kian merosot. Akan tetapi, upaya memanfaatkan pandemi untuk menciptakan polarisasi ini telah mencederai upaya penanganan pandemi di negara-negara tersebut, yang pada akhirnya menjadi bumerang bagi elektabilitas mereka. Buruknya penanganan dan polarisasi pandemi selama kepemimpinan Trump, misalnya, turut andil dalam kekalahan Trump saat pemilihan ulang. Presiden petahana A.S. jarang menelan kekalahan saat pemilihan ulang, dan studi yang dirilis setelah pemilu oleh profesor ilmu politik Leonardo Baccini, Abel Brodeur, dan Stephen Weymouth mengungkapkan bahwa seandainya Trump menerapkan langkah yang sedikit lebih efektif dalam menangani pandemi dan

efek resesinya, dia akan dapat memenangkan pemilu.⁷⁰ Sebaliknya, gubernur A.S. dari kubu Partai Demokrat dan Republik yang mendorong adanya kesatuan dan mengembangkan tanggapan yang cukup efektif terhadap pandemi mendapatkan tingkat persetujuan yang tinggi dari partisan Partai Demokrat maupun Republik.⁷¹

Secara retorik, pembuat kebijakan di lima negara demokrasi besar ini harus menyoroti bagaimana jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar mayoritas masyarakat ingin bekerja sama, jemu dengan polarisasi, dihantui rasa takut jika kegagalan menuju tribalisme politik dapat menimbulkan otoritarianisme yang jauh lebih besar dan kekerasan yang kentara, serta memiliki banyak sasaran kebijakan yang sama. Upaya memajukan rekonsiliasi ini harus menekankan bahwa pendekatan ini berasal dari dukungan akar rumput, bukan perintah dari atas ke bawah.

Mendorong reformasi demokrasi sistemis terhadap sistem politik dan elektoral, serta menghukum pelaku yang secara agresif menggalakkan polarisasi. Ini antara lain dapat termasuk menggalakkan pengambilan suara berpreferensi, kampanye yang didanai publik, serta penunjukan distrik yang adil dan representatif dalam pemilu negara bagian dan federal. Pemerintahan Biden telah merangkul reformasi tata kelola komprehensif yang dirancang untuk mendukung hak pengambilan suara serta mengurangi pembatasan daerah pemilihan partisan, yang cenderung meleburkan kekuatan pemilih minoritas.⁷²

Pembuat kebijakan juga harus mengambil langkah hukuman tegas terhadap mereka yang ingin memanfaatkan krisis demi menggalakkan polarisasi dan menyasar kelompok minoritas. Langkah ini dapat meliputi tekanan dari jenjang legislatif dan eksekutif pada platform media sosial untuk menindak ungkapan kekerasan serta upaya untuk menghukum politikus yang menyebarkan kebencian terhadap kelompok minoritas atau yang secara umum menggalakkan polarisasi dan tindakan antidemokrasi. Hukuman tersebut dapat meliputi pencopotan dari posisi penting oleh ketua partai atau mengeluarkan mereka dari partai, yang akan menjadi pesan kuat bagi pelaku lain. Misalnya, setelah Perwakilan Negara Bagian Michigan dari Partai Republik, Gary Eisen, pada Desember 2020 mengisyaratkan akan memicu kekerasan selama pertemuan pemilih presidensial Michigan, Partai Republik Michigan langsung mencopotnya dari jabatan komite.⁷³ Ini cukup adil, mengingat masa jabatan legislatif negara bagian akan segera berakhir. Apabila mereka ingin menekan polarisasi dan membangun kembali kepercayaan publik, partai politik dan pemimpin partai harus mengambil langkah lebih kuat dan tegas dalam menangani anggotanya yang mencoba melakukan polarisasi dan menggalakkan tindakan antidemokrasi. Akan tetapi, pada akhirnya, semua kembali ke tangan pemilih untuk menghukum politikus yang paling mempolarisasi di bilik suara, sehingga dapat mendorong pemimpin politik agar menjadi lebih moderat dan berkompromi.

Memanfaatkan keadaan darurat untuk memajukan pemikiran kebijakan terobosan baru yang mampu memberantas ketimpangan yang meningkat. Keadaan darurat dapat memantik pemikiran baru bagi semua kebijakan. COVID-19 telah menyibak ketimpangan dan kelemahan politik yang begitu nyata di lima negara ini—bagi publik dan bahkan bagi banyak pembuat kebijakan yang selama ini mengabaikan masalah yang telah mengakar di negara ini. Sejumlah pemimpin di lima negara demokrasi besar ini telah melakukan reformasi dramatis yang sebelumnya ditentang—baik karena mereka benar-benar berubah ataupun takut kehilangan jabatan jika tidak mengubah taktiknya.

Di India, Modi dan partai yang berkuasa telah mendorong sejumlah reformasi ekonomi paling komprehensif selama beberapa dekade terakhir, yang sebagian untuk menanggapi kehancuran ekonomi akibat COVID-19 yang memaksa ekonomi India memasuki kontraksi besar.⁷⁴ Di Amerika Serikat, Presiden Biden, yang telah dikenal sebagai seorang sentris dari Demokrat, maju dalam pemilu 2020 menggunakan kebijakan paling progresif selama sejarah modern Partai Demokrat di tengah pandemi dan derasnya protes dari seantero negeri atas keadilan rasial, serta telah mengajukan proposal yang berani untuk mengubah imigrasi, menangani dampak COVID-19 terhadap kesehatan publik, melawan kemiskinan anak dan

ketimpangan ekonomi, serta merangsang pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Partai Demokrat termasuk sumpah untuk melipatgandakan pengeluaran pemerintah bagi keluarga berpendapatan rendah dan secara drastis memperluas prakarsa kesejahteraan sosial lainnya, termasuk dengan membuat opsi asuransi kesehatan publik.⁷⁵ Pada Maret, Dewan dan Senat yang mayoritas dikuasai oleh Partai Demokrat ini meloloskan proposal tersebut dan Presiden Biden menandatangani undang-undang stimulus sebesar US\$1,9 triliun, yang berisi program baru yang masif demi menangani kemiskinan anak dalam jangka panjang serta langkah untuk membantu sekolah, pemerintah negara bagian dan setempat, serta komunitas dan individu lain yang amat terpuak dalam jangka pendek.⁷⁶ Sementara itu, sejumlah pemimpin dan politikus Partai Republik, termasuk Senator Florida Marco Rubio dan Senator Utah Mitt Romney, telah memperhatikan peningkatan disfungsi pemerintah Amerika Serikat dan mengerahkan reformasi besar dalam menanggapinya, termasuk jenis kebijakan industri baru, upaya untuk mengurangi kemiskinan anak dan ketimpangan, serta langkah menekan monopoli di sektor tertentu.⁷⁷ Rubio dan Romney tak sendiri. Sejumlah kelompok pemikir konservatif, lembaga penelitian, dan publikasi telah menunjukkan penerimaan lebih besar atas pemikiran terobosan baru dalam menangani masalah ekonomi Amerika Serikat yang begitu dalam. Misalnya, publikasi konservatif populis *American Affairs*, yang awalnya menyatakan diri sebagai pendukung Trump, tetapi setelah bergeser ke populisme yang condong ke sayap kanan, telah menyambut baik gagasan seperti memangkas monopoli, memajukan kebijakan industri modern, dan reformasi besar lain yang dirancang demi melejitkan pertumbuhan serta menangani ketimpangan di Amerika Serikat.⁷⁸

Pembuat kebijakan lain di lima negara demokrasi ini harus merenungkan keadaan darurat yang terjadi serta menanggapi pandemi dengan reformasi besar yang dibuat demi mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Secara retorik, pemimpin dan politikus oposisi harus menyambut reformasi ekonomi yang paling berani dan dengan jangkauan paling luas, yang dirancang demi mengamankan keadaan darurat dengan segera dan menjadikan pertumbuhan lebih adil. Bagaimanapun, periode saat pertumbuhan ekonomi bergerak naik dan meluas cenderung menjadi era saat kompromi politik lebih mudah dan tribalisme politik menjadi surut. Sebagaimana disebutkan dalam makalah terkini karya sosiologi Jack A. Goldstone dan ilmuwan Peter Turchin mengenai polarisasi Amerika Serikat, masyarakat yang kooperatif dan saling percaya di Amerika Serikat sebagian dibangun berkat pertumbuhan bersama pada masa lalu, khususnya pada 1930-an dan 1970-an. Namun demikian, saat ini mereka berdalih bahwa politik A.S. telah bergeser (seperti halnya politik di negara seperti Brasil dan Filipina) dan pemimpin elite politik semakin giat “mencari dukungan dari kelas pekerja bukan dengan berbagi kekayaan atau dengan memperluas layanan publik dan berkorban demi memperbaiki kepentingan bersama, tetapi dengan membujuk kelas pekerja bahwa mereka dikelilingi musuh yang membenci mereka ... dan ingin mengambil sedikit harta yang mereka miliki. Pola ini menimbulkan polarisasi dan ketidakpercayaan serta berhubungan erat dengan konflik sipil, kekerasan, dan kemerosotan demokrasi,” yang begitu kentara dalam politik A.S. pada beberapa bulan terakhir.⁷⁹

Menggunakan segala langkah ekonomi yang dapat dilakukan demi menanggulangi kerugian ekonomi akibat pandemi serta mengatasi cara COVID-19 menimbulkan ketimpangan lebih lanjut. Pemerintah harus memberikan sebanyak mungkin stimulus, idealnya melalui program bantuan tunai dan menyisihkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap utang dan anggaran negara nanti, khususnya mengingat rendahnya suku bunga di berbagai negara. Program bantuan tunai berskala besar ini akan membantu mengurangi kerugian ekonomi akibat pandemi dalam jangka waktu lama bagi masyarakat paling miskin dan dapat memberikan manfaat besar dalam menangani ketimpangan. Mereka juga harus memanfaatkan maraknya dukungan untuk memperluas asuransi kesehatan publik, yang sebagian dipicu oleh pandemi, agar sebisa mungkin memperluas program asuransi kesehatan nasional. Pendekatan ini akan berpengaruh besar terhadap warga miskin serta banyak kelompok minoritas, sekaligus dapat mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Pembuat kebijakan harus menggunakan peluang pada masa pandemi ini untuk membuka pasar domestik, seperti pasar pertanian India, yang terperosok dalam birokrasi, dan dapat menyediakan pekerjaan

baru di tengah pengangguran massal yang terjadi di kalangan warga miskin. Modi telah mendorong reformasi ini, yang disebut-sebut sebagai langkah paling komprehensif di India dalam tiga dekade terakhir, yang termasuk langkah signifikan bagi sektor pertanian yang sangat diatur dan berencana untuk memperluas program asuransi sosial nasional India.⁸⁰

Memastikan reformasi besar ini diterapkan secara demokratis. Di sejumlah negara demokrasi besar ini, seperti Indonesia dan Filipina, para pemimpin telah memanfaatkan pandemi demi menghimpun kekuatan eksekutif. Di negara lain seperti India, pemimpin telah mendorong reformasi penting, tetapi dengan cara yang relatif tidak demokratis. Pemerintahan Modi, misalnya, mendorong reformasi pertanian dan tenaga kerja yang dapat menopang ekonomi India, dengan sedikit diskusi di parlemen dan debat publik, sembari terus merendahkan dan menekan media.⁸¹ Di Indonesia, Presiden Jokowi telah mendorong perundang-undangan besar yang dirancang untuk memangkas birokrasi, mendorong investasi, dan menata ulang pasar kerja, tetapi juga meneruskan langkah ini ke jenjang legislatif, meski diujani protes dari publik dan dengan sedikit sekali konsultasi kepada publik, sembari mencoba membatasi masyarakat sipil.⁸² Sekalipun langkah ini secara efektif mendorong pertumbuhan dan mungkin menangani ketimpangan, meloloskannya tanpa pertimbangan signifikan dari publik dan legislatif mencederai kepercayaan publik. Pembuat kebijakan harus memastikan reformasi besar diloloskan setelah dibahas secara matang dengan publik, termasuk diskusi terbuka dan transparan di jenjang legislatif nasional. Pada saat bersamaan, pemimpin harus menahan godaan untuk memanfaatkan pandemi guna mengonsolidasikan lebih banyak kekuatan eksekutif dengan memastikan setiap langkah yang memberi mereka kekuatan darurat lebih besar memiliki batas waktu perundang-undangan yang jelas.⁸³

Kesimpulan

Apabila Amerika Serikat, Brasil, India, Indonesia, dan Filipina dapat memupuk rekonsiliasi sosial dan menggalakkan reformasi ekonomi dan politik transformatif di negaranya, peralihan ini akan menghadirkan manfaat langsung yang bertahan lama. Ini akan melindungi dari pukulan kesehatan dan ekonomi yang memilukan akibat pandemi serta membantu negara ini mengatasi ketimpangan sosial yang telah lama terjadi dan mengancam stabilitas mereka. Reformasi tersebut juga mungkin menghadirkan manfaat kesehatan publik yang signifikan: rekonsiliasi yang meningkatkan kepercayaan intrasosial publik dapat membantu menyiapkan negara agar lebih baik dalam menangani bencana di masa depan, termasuk pandemi.⁸⁴

Perubahan efektif di lima negara besar ini juga akan menguntungkan dunia secara lebih luas. Mengingat ukuran lima negara ini serta kepemimpinan regional dan global mereka, dunia akan menyaksikan jika mereka dapat memanfaatkan pandemi demi menangani disfungsi politik yang kian meroket serta membuat perubahan struktural pada keadaan ekonomi dan masyarakatnya.

Bagaimanapun, demokrasi mengalami kemunduran hampir di seluruh dunia, meski lima negara ini merupakan contoh yang paling mencolok. Banyak negara kesulitan menangani melonjaknya polarisasi, meningkatnya kebencian pada keahlian, dan melesatnya ketimpangan—pada saat yang sama, kelompok yang secara historis terpinggirkan lebih banyak angkat suara. Dalam survei terkininya seputar kebebasan global, Freedom House menyebut bahwa dunia telah mengalami kemunduran demokrasi selama lima belas tahun.⁸⁵

Kegagalan untuk menerapkan reformasi substansial dapat memiliki konsekuensi berbahaya—baik bagi keadaan ekonomi lima negara ini dan bagi sistem politik mereka yang kian terpolarisasi. Jika pandemi mengakibatkan stagnasi ekonomi atau resesi berkepanjangan di negara demokrasi besar ini, hal tersebut akan lebih lanjut menimbulkan ketimpangan ekonomi dan sosial yang dalam. Selain itu, kemerosotan ekonomi secara berkelanjutan dapat menjadikan lebih banyak politikus tergoda untuk mengambinghitamkan berbagai kelompok, menyulut polarisasi, dan menobatkan diri mereka sebagai satu-satunya solusi bagi kegagalan sistem politik ini. Dalam melakukannya, mereka akan memupuk ketidakpercayaan lebih besar bagi segala keahlian dan mengakibatkan degradasi demokrasi lebih lanjut.⁸⁶ Dinamika ini akan mengurangi kepercayaan publik kepada pemerintah serta menyulitkan pemimpin mendatang memupuk kompromi dan melawan tindakan antidemokrasi. Dan karena lima negara ini termasuk negara demokrasi terkuat dan terpadat di dunia, arah politik mereka—bahkan arah yang terus menurun—menjadi contoh bagi negara demokrasi lain.

Tentang Penulis

Joshua Kurlantzick adalah peneliti senior di bidang Asia Tenggara di Council on Foreign Relations (CFR). Dia berfokus pada hubungan Tiongkok dengan Asia Tenggara dan pendekatan Tiongkok terhadap kekuasaan lunak dan tajam, termasuk media dan informasi yang didukung oleh negara. Kurlantzick juga mempelajari maraknya populisme global, populisme di Asia, dan efek COVID-19 terhadap kebebasan politik dan populisme iliberal. Kurlantzick sebelumnya adalah peneliti tamu di Carnegie Endowment for International Peace, tempat dia mempelajari politik dan ekonomi Asia Tenggara serta hubungan Tiongkok dengan Asia Tenggara, termasuk investasi, bantuan, dan diplomasi Tiongkok. Sebelumnya, dia adalah peneliti di University of Southern California's Center on Public Diplomacy dan peneliti di Pacific Council on International Policy. Kurlantzick adalah pemenang beasiswa Luce untuk jurnalisisme di Asia serta menjadi finalis Osborn Elliott Prize untuk Keunggulan Jurnalisisme di Asia. Bukunya *Charm Offensive: How China's Soft Power Is Transforming the World* dinominasikan untuk Arthur Ross Book Award 2008 di CFR. Dia juga penulis *State Capitalism: How the Return of Statism Is Transforming the World*, *Democracy in Retreat: The Revolt of the Middle Class and the Worldwide Decline in Representative Government*, dan *A Great Place to Have a War: America in Laos and the Birth of a Military CIA*. Kurlantzick menerima gelar BA di bidang ilmu politik dari Haverford College.

Catatan Akhir

1. "Coronavirus in the U.S.: Latest Map and Case Count," *New York Times*, accessed February 18, 2021, <http://nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html>; "Brazil Coronavirus Map and Case Count," *New York Times*, accessed February 18, 2021, <http://nytimes.com/interactive/2020/world/americas/brazil-coronavirus-cases.html>; "India Coronavirus Map and Case Count," *New York Times*, accessed February 18, 2021, <http://nytimes.com/interactive/2020/world/asia/india-coronavirus-cases.html>; Niniek Karmini and Edna Tarigan, "Indonesia's Confirmed Coronavirus Cases Exceed 1 Million," Associated Press, January 26, 2021, <http://ap-news.com/article/pandemics-jakarta-indonesia-coronavirus-pandemic-asia-5eca0484e70f8b702fa6d4ea1e9c2780>; "Philippines," World Health Organization Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, accessed February 18, 2021, <http://covid19.who.int/region/wpro/country/ph>.
2. Christina Farr, "Germany's Coronavirus Response Is a Master Class in Science Communication," CNBC, July 21, 2020, <http://cnbc.com/2020/07/21/germanys-coronavirus-response-masterful-science-communication.html>; Kate O'Flaherty, "How Taiwan Beat COVID-19," *Wired*, November 14, 2020, <http://wired.co.uk/article/taiwan-coronavirus-covid-response>; Rebecca Ratcliffe, "How Have Thailand and Cambodia Kept COVID Cases So Low?," *Guardian*, December 16, 2020, <http://theguardian.com/world/2020/dec/16/thailand-cambodia-covid-19-cases-deaths-low>; Joshua Kurlantzick, *Addressing the Effect of COVID-19 on Democracy in South and Southeast Asia* (New York: Council on Foreign Relations, 2020), 2–19.
3. Brett Bundale, "Rich Get Richer, Poor Poorer: Two Reports Say Pandemic Intensifying Inequalities," CTV News, October 13, 2020, <http://ctvnews.ca/business/rich-get-richer-poor-poorer-two-reports-say-pandemic-intensifying-inequalities-1.5142835>; Steve Scherer, "Canada to Give Citizens Income Support Amid Coronavirus Outbreak—Trudeau," Reuters, March 17, 2020, <http://reuters.com/article/health-coronavirus-canada/canada-to-give-citizens-income-support-amid-coronavirus-outbreak-trudeau-idUKL8N2BA6LD>; David Junggren and Kelsey Johnson, "Canada to Extend Wage Subsidies, Trudeau Denies He Is Soft on Fraudulent Claims," Reuters, May 15, 2020, <http://reuters.com/article/us-health-coronavirus-canada/canada-to-extend-wage-subsidies-trudeau-denies-he-is-soft-on-fraudulent-claims-idUSKBN22R2IV>; Luke Henriques-Gomes, "We Should Not Pretend Everybody Is Suffering Equally: COVID Hits Australia's Poor the Hardest," *Guardian*, September 26, 2020, <http://theguardian.com/australia-news/2020/sep/27/we-should-not-pretend-everybody-is-suffering-equally-covid-hits-australias-poor-the-hardest>; Colin Packham, "Australia Expands Wage Subsidy Scheme as COVID-19 Cases Surge," Reuters, July 15, 2020, <http://reuters.com/article/us-health-coronavirus-australia/australia-expands-wage-subsidy-scheme-as-covid-19-cases-surge-idUSKCN24H049>; Colin Packham, "Australia Making Wage Subsidies Easier as COVID-19 Surges, PM to Say," Reuters, August 6, 2020, <http://reuters.com/article/us-health-coronavirus-australia-economy/australia-making-wage-subsidies-easier-as-covid-19-surges-pm-to-say-idUSKCN2521T4>.
4. Todd Pollack et al., "Emerging COVID-19 Success Story: Vietnam's Commitment to Containment," *Exemplars in Global Health*, updated March 5, 2021, <http://ourworldindata.org/covid-exemplar-vietnam>.
5. David D. Kirkpatrick and José María León Cabrera, "How Trump and Bolsonaro Broke Latin America's COVID-19 Defenses," *New York Times*, October 27, 2020, <http://nytimes.com/2020/10/27/world/trump-bolsonaro-coronavirus-latin-america.html>.
6. "COVID-19 Has Shone a Light on Racial Disparities in Health," *Economist*, November 21, 2020, <http://economist.com/international/2020/11/21/covid-19-has-shone-a-light-on-racial-disparities-in-health>; Robert Preidt, "Minorities Hit Hardest by COVID-19, Study Confirms," *U.S. News & World Report*, August 17, 2020, <http://usnews.com/news/health-news/articles/2020-08-17/minorities-hit-hardest-by-covid-19-study-confirms>; Helen Regan and Manveena Suri, "India Records 1 Million Cases of COVID-19 ... and It's the Poorest Who Are Hardest Hit," CNN, July 17, 2020, <http://cnn.com/2020/07/16/asia/india-wealth-gap-coronavirus-intl-hnk/index.html>; Randy Mulyanto, "Coronavirus Exposes Hidden Struggles of Poor Indonesian-Chinese Families," *South China Morning Post*, September 7, 2020, <http://scmp.com/week-asia/people/article/3099986/coronavirus-exposes-hidden-struggles-poor-indonesian-chinese>; Jason Gutierrez, "'Will We Die Hungry?' A Teeming Manila Slum Chafes Under Lockdown," *New York Times*, April 15, 2020, <http://nytimes.com/2020/04/15/world/asia/manila-coronavirus-lockdown-slum.html>; Max Fisher and Emma Bubola, "As Coronavirus Deepens Inequality, Inequality Worsens Its Spread," *New York Times*, March 15, 2020, <http://nytimes.com/2020/03/15/world/europe/coronavirus-inequality.html>.
7. Lauren Medina, Shannon Sabo, and Jonathan Vespa, "Living Longer: Historical and Projected Life Expectancy in the United States, 1960 to 2060," U.S. Census Bureau, February 2020, <http://census.gov/content/dam/Census/library/publications/2020/demo/p25-1145.pdf>; Sean Fleming, "Life Expectancy in India Has Increased by 11 Years Since 1990," World Economic Forum, October 16, 2018, <http://weforum.org/agenda/2018/10/life-expectancy-jumps-11-years-in-india>.

8. Sarah Repucci and Amy Slipowitz, "Democracy Under Lockdown: The Impact of COVID-19 on the Global Struggle for Freedom," Freedom House, October 2020, <http://freedomhouse.org/report/special-report/2020/democracy-under-lockdown>.
9. Praveen Menon, "New Zealand's Ardern Wins 'Historic' Re-Election for Crushing COVID-19," Reuters, October 16, 2020, <http://reuters.com/article/uk-newzealand-election/new-zealands-ardern-wins-historic-re-election-for-crushing-covid-19-idUSKBN2712Z1>; Alexander Smith, "New Zealand's Jacinda Ardern Wins Big After World-Leading COVID-19 Response," NBC News, October 20, 2020, <http://nbcnews.com/news/world/new-zealand-s-jacinda-ardern-wins-big-after-world-leading-n1243972>.
10. "Brazil," Freedom House, 2020, <http://freedomhouse.org/country/brazil/freedom-world/2020>; Perry Anderson, "The Cardoso Legacy," *London Review of Books*, December 12, 2002, <http://lrb.co.uk/the-paper/v24/n24/perry-anderson/the-cardoso-legacy>; "Indonesia," Freedom House, 2020, <http://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2020>; Ben Bland, "The World's Most Complicated Single-Day Election Is a Feat of Democracy," *Atlantic*, April 15, 2019, <http://theatlantic.com/international/archive/2019/04/indonesias-elections-are-feat-democracy/587143>.
11. Jillian Keenan, "The Grim Reality Behind the Philippines' Economic Growth," *Atlantic*, May 7, 2013, <http://theatlantic.com/international/archive/2013/05/the-grim-reality-behind-the-philippines-economic-growth/275597>.
12. Yenny Tjoe, "Two Decades of Economic Growth Benefited Only the Richest 20%. How Severe Is Inequality in Indonesia?," *Conversation*, August 28, 2018, <http://theconversation.com/two-decades-of-economic-growth-benefited-only-the-richest-20-how-severe-is-inequality-in-indonesia-101138>.
13. Katherine Schaeffer, "6 Facts About Economic Inequality in the U.S.," Pew Research Center, February 7, 2020, <http://pewresearch.org/fact-tank/2020/02/07/6-facts-about-economic-inequality-in-the-u-s>; "Brazil: Extreme Inequality in Numbers," Oxfam International, <http://oxfam.org/en/brazil-extreme-inequality-numbers>; Anakwa Dwamena, "How Jair Bolsonaro and the Coronavirus Put Brazil's Systemic Racism on Display," *New Yorker*, July 9, 2020, <http://newyorker.com/news/news-desk/how-jair-bolsonaro-and-the-coronavirus-put-brazils-systemic-racism-on-display>.
14. Schaeffer, "6 Facts About Economic Inequality in the U.S."; Juzhong Zhuang, "The Recent Trend of Income Inequality in Asia and How Policy Should Respond," Group of 24 and Friedrich-Ebert-Stiftung New York, October 2018, http://g24.org/wp-content/uploads/2018/10/Rising_income_inequality_in_Asia.pdf; Tjoe, "Two Decades of Economic Growth Benefited Only the Richest 20%."; "Income Inequality in India Continues to Rise: Report," *Wire*, November 19, 2020, <http://thewire.in/economy/income-inequality-india-china-report>.
15. Reed Abelson and Abby Goodnough, "If the Supreme Court Ends Obamacare, Here's What It Would Mean," *New York Times*, February 10, 2021, <http://nytimes.com/article/supreme-court-obamacare-case.html>; Andrew Keshner, "Obamacare Is Closing the Coverage Gap Between Rich and Poor, Black and White," *MarketWatch*, August 20, 2019, <http://marketwatch.com/story/obamacare-is-closing-the-coverage-divide-between-rich-and-poor-black-and-white-2019-08-19>.
16. Chris Megerian and Noah Bierman, "Trump Ignores Calls for Police Reforms," *Los Angeles Times*, June 4, 2020, <http://latimes.com/politics/story/2020-06-04/trump-ignores-calls-for-police-reforms>; Joel Shannon, "USA Today Poll: Americans Want Major Police Reform, More Focus on Serious Crime," *USA Today*, June 29, 2020, <http://usatoday.com/story/news-nation/2020/06/29/us-police-reform-poll-finds-support-more-training-transparency/3259628001>; Perry Bacon Jr., "Five Ways Trump and GOP Officials Are Undermining the Election Process," *FiveThirtyEight*, August 11, 2020, <http://fivethirtyeight.com/features/five-ways-trump-and-gop-officials-are-undermining-the-election-process>; Theodore R. Johnson, "The New Voter Suppression," Brennan Center for Justice, January 16, 2020, <http://brennancenter.org/our-work/research-reports/new-voter-suppression>.
17. Hannah Ellis-Petersen, "Rodrigo Duterte's Drug War Is 'Large-Scale Murdering Enterprise' Says Amnesty," *Guardian*, July 8, 2019, <http://theguardian.com/world/2019/jul/08/rodrigo-dutertes-drug-war-is-large-scale-murdering-enterprise-says-amnesty>; "Philippines: 'They Just Kill.' Ongoing Extrajudicial Executions and Other Violations in the Philippines' 'War on Drugs,'" Amnesty International, July 8, 2019, <http://amnesty.org/en/documents/asa35/0578/2019/en>.
18. Eugene Robinson, "Trump Stokes Resentment Toward Minorities. Republicans Just Smile," *Washington Post*, November 5, 2018, http://washingtonpost.com/opinions/trump-stokes-resentment-toward-minorities-republicans-just-smile/2018/11/05/10e059e0-e13b-11e8-8f5f-a55347f48762_story.html; Eugene Scott, "Trump's Most Insulting—and Violent—Language Is Often Reserved for Immigrants," *Washington Post*, October 2, 2019, <http://washingtonpost.com/politics/2019/10/02/trumps-most-insulting-violent-language-is-often-reserved-immigrants>.
19. Fiona Watson, "Bolsonaro's Election Is Catastrophic News for Brazil's Indigenous Tribes," *Guardian*, October 31, 2018, <http://theguardian.com/commentisfree/2018/oct/31/jair-bolsonaro-brazil-indigenous-tribes-mining-logging>; "Brazil's Indigenous to Sue Bolsonaro for Saying They're 'Evolving,'" Reuters, January 24, 2020, <http://reuters.com/article/us-brazil-indigenous/brazils-indigenous-to-sue-bolsonaro-for-saying-theyre-evolving-idUSKBN1ZN1TD>; Katy Watson, "The Racism Denier in Charge of Defending Black Rights in Brazil," BBC, February 15, 2020, <http://bbc.com/news/world-latin-america-51501111>.
20. Leticia Casado and Ernesto Londoño, "Under Brazil's Far-Right Leader, Amazon Protections Slashed and Forests Fall," *New York Times*, July 28, 2019, <http://nytimes.com/2019/07/28/world/americas/brazil-deforestation-amazon-bolsonaro.html>; Shanna Hanbury, "Murders of Indigenous Leaders in Brazilian Amazon Hits Highest Level in Two Decades," *Mongabay*, December 14, 2019, <http://news.mongabay.com/2019/12/murders-of-indigenous-leaders-in-brazil-amazon-hit-highest-level-in-two-decades>.
21. "Twitter Takes Down Yogi Adityanath's Controversial Green Virus Tweet," *India Today*, April 17, 2019, <http://indiatoday.in/elections/lok-sabha-2019/story/twitter-yogi-adityanath-green-virus-1503887-2019-04-17>; "Yogi Adityanath: 'Muslims Did No Favour to India by Staying Here,'" BBC, February 5, 2020, <http://bbc.com/news/world-asia-india-51382414>.

22. Meenakshi Ganguly, "BJP Government Must Acknowledge Critics' Fears and Stop Resorting to Majoritarian Victimhood," *Scroll.in*, March 13, 2020, <http://scroll.in/article/955744/bjp-government-must-acknowledge-critics-fears-and-stop-resorting-to-majoritarian-victimhood>.
23. Frank J. Thompson, "Six Ways Trump Has Sabotaged the Affordable Care Act," Brookings Institution, October 9, 2020, <http://brookings.edu/blog/fixgov/2020/10/09/six-ways-trump-has-sabotaged-the-affordable-care-act>; Phil McCausland, "Residents Suffer as Mississippi and 13 Other States Debate Medicaid Expansion," NBC News, November 4, 2019, <http://nbcnews.com/news/us-news/residents-suffer-mississippi-13-other-states-debate-medicaid-expansion-n1075661>; Dylan Scott, "Thousands Will Go Uninsured in the COVID-19 Outbreak Because Republicans Rejected Medicaid Expansion," *Vox*, May 5, 2020, <http://vox.com/2020/5/5/21247204/coronavirus-unemployment-medicaid-eligibility-health-insurance>.
24. Fisher and Bubola, "As Coronavirus Deepens Inequality, Inequality Worsens Its Spread." The *New York Times* story notes that "one study in the United States found that state-mandated sick day policies reduce the spread of an influenza epidemic by up to 40 percent," a sign of how effective sick leave policies can be in controlling the spread of disease. Yet most U.S. states do not mandate paid sick leave.
25. "New Nationwide Poll by the Kaiser Family Foundation and the Undeclared Reveals Distrust of the Health Care System Among Black Americans," Kaiser Family Foundation, October 13, 2020, <http://kff.org/racial-equity-and-health-policy/press-release/new-nationwide-poll-by-the-kaiser-family-foundation-and-the-undeclared-reveals-distrust-of-the-health-care-system-among-black-americans>.
26. Adrian Florido, "Many Hispanic and Black People Say They Are Skeptical About COVID-19 Vaccine," NPR, December 10, 2020, <http://npr.org/2020/12/10/945136592/many-hispanic-and-black-people-say-they-are-skeptical-about-covid-19-vaccine>.
27. Hanna Recht and Lauren Weber, "Black Americans Are Getting Vaccinated at Lower Rates Than White Americans," *Kaiser Health News*, January 17, 2021, <http://khn.org/news/article/black-americans-are-getting-vaccinated-at-lower-rates-than-white-americans>; Abby Goodnough and Jan Hoffman, "The Wealthy Are Getting More Vaccinations, Even in Poorer Neighborhoods," *New York Times*, February 2, 2021, <http://nytimes.com/2021/02/02/health/white-people-covid-vaccines-minorities.html>.
28. Zeke Miller and Jill Colvin, "Trump Attacks Dr. Anthony Fauci, Says 'People Are Tired of Hearing' Him and 'All These Idiots' on Coronavirus," *Chicago Tribune*, October 19, 2020, <http://chicagotribune.com/coronavirus/ct-nw-trump-fauci-coronavirus-20201019-rofykxwrbcdghjpa3r6tdjmu-story.html>; Toluse Olorunnipa, Ariana Eunjung Cha, and Laurie McGinley, "Drug Promoted by Trump as Coronavirus 'Game Changer' Increasingly Linked to Deaths," *Washington Post*, May 15, 2020, http://washingtonpost.com/politics/drug-promoted-by-trump-as-coronavirus-game-changer-increasingly-linked-to-deaths/2020/05/15/85d024fe-96bd-11ea-9f5e-56d8239bf9ad_story.html; Libby Cathey, "Timeline: Tracking Trump Alongside Scientific Developments on Hydroxychloroquine," ABC News, August 8, 2020, <http://abcnews.go.com/Health/timeline-tracking-trump-alongside-scientific-developments-hydroxychloroquine/story?id=72170553>; Libby Cathey, "Trump, Downplaying Virus, Has Mocked Wearing Masks for Months," ABC News, October 2, 2020, <http://abcnews.go.com/Politics/trump-downplaying-virus-mocked-wearing-masks-months/story?id=73392694>; Robin Givhan, "Trump's Refusal to Wear Face Masks Turned Them Into a Sad National Symbol," *Washington Post*, October 3, 2020, <http://washingtonpost.com/nation/2020/10/03/trumps-refusal-wear-face-masks-turned-them-into-sad-national-symbol/>; Michael D. Shear and Sarah Mervosh, "Trump Encourages Protest Against Governors Who Have Imposed Virus Restrictions," *New York Times*, April 17, 2020, <http://nytimes.com/2020/04/17/us/politics/trump-coronavirus-governors.html>.
29. David Pierson, "Dying Doctors. Too Many Coffins. Indonesia Late in Battle Against Coronavirus," *Los Angeles Times*, April 24, 2020, <http://latimes.com/world-nation/story/2020-04-24/coronavirus-indonesia-response>; Aisyah Llewellyn, "Coronavirus: Trump and Widodo Back Chloroquine Treatment, But Fake News About This Drug Is as Deadly as COVID-19," *South China Morning Post*, March 25, 2020, <http://scmp.com/week-asia/health-environment/article/3076935/coronavirus-trump-and-widodo-back-chloroquine>; David Biller, Marcelo de Sousa, and Mauricio Savarese, "Bolsonaro Now 'Poster Boy' for Dubious COVID-19 Treatment," Associated Press, July 9, 2020, <http://apnews.com/article/66a86e4ccc4e94ea75a8eadd92afeb3>.
30. "Brazil's Bolsonaro Says He Will Not Take Coronavirus Vaccine," Reuters, November 26, 2020, <http://reuters.com/article/us-brazil-bolsonaro-vaccine/brazils-bolsonaro-says-he-will-not-take-coronavirus-vaccine-idUSKBN28704L>; "Brazil Deploys Army for Education Campaign Against Zika Virus," *Deutsche Welle*, February 14, 2016, <http://dw.com/en/brazil-deploys-army-for-education-campaign-against-zika-virus/a-19047473>.
31. "More Brazilians Skeptical of COVID-19 Vaccine: Poll," *Al Jazeera*, December 12, 2020, <http://aljazeera.com/news/2020/12/12/more-brazilians-sceptical-of-covid-19-vaccine-poll>.
32. Henry Ridgwell, "Poverty Dramatically Increases COVID-19 Death Risk, Researchers Say," *Voice of America*, June 22, 2020, <http://voanews.com/covid-19-pandemic/poverty-dramatically-increases-covid-19-death-risk-researchers-say>; Amy Goldstein, "Income Emerges as a Major Predictor of Coronavirus Infections, Along With Race," *Washington Post*, June 22, 2020, http://washingtonpost.com/health/income-emerges-as-a-major-predictor-of-coronavirus-infections-along-with-race/2020/06/22/9276f31e-b4a3-11ea-a510-55bf26485c93_story.html; Bansari Kamdar, "India's Rich Prosper During the Pandemic While Its Poor Stand Precariously at the Edge," *Diplomat*, September 10, 2020, <http://thediplomat.com/2020/09/indias-rich-prosper-during-the-pandemic-while-its-poor-stand-precariously-at-the-edge>; Amrit Dhillon, "'We Have Abandoned the Poor': Slums Suffer as COVID-19 Exposes India's Social Divide," *Guardian*, August 2, 2020, <http://theguardian.com/global-development/2020/aug/03/we-have-abandoned-the-poor-slums-suffer-as-covid-19-exposes-indias-social-divide>; Terrence McCoy and Heloisa Traiano, "One Disease. Two Brazils," *Washington Post*, August 10, 2020, <http://washingtonpost.com/world/2020/08/10/covid-brazil-deaths-inequality/?arc404=true>; Gutierrez, "'Will

- We Die Hungry?"; Melissa Sou-Jie Brunnersum, "Coronavirus: Vulnerable Filipinos Fight for Survival During Lockdown," *Deutsche Welle*, April 27, 2020, <http://dw.com/en/coronavirus-vulnerable-filipinos-fight-for-survival-during-lockdown/a-53258915>.
33. World 101, "Eighteen Ways COVID-19 Is Reshaping the World," Council on Foreign Relations, 2020, <http://world101.cfr.org/global-era-issues/covid-19/eighteen-ways-covid-19-reshaping-world>.
34. Dwamena, "How Jair Bolsonaro and the Coronavirus Put Brazil's Systemic Racism on Display"; McCoy and Traiano, "One Disease. Two Brazils."
35. Nina Storchlic, "One in Six Americans Could Go Hungry as Pandemic Persists," *National Geographic*, November 24, 2020, <http://nationalgeographic.com/history/article/one-in-six-could-go-hungry-2020-as-covid-19-persists>.
36. "Tracking the COVID-19 Recession's Effects on Food, Housing, and Employment Hardships," Center on Budget and Policy Priorities, December 2020, <http://cbpp.org/research/poverty-and-inequality/tracking-the-covid-19-recessions-effects-on-food-housing-and>; Zia Qureshi, "Tackling the Inequality Pandemic: Is There a Cure?," Brookings Institution, November 17, 2020, <http://brookings.edu/research/tackling-the-inequality-pandemic-is-there-a-cure>.
37. Emily Stewart, "The PPP Worked How It Was Supposed To. That's the Problem." *recode*, July 13, 2020, <http://vox.com/recode/2020/7/13/21320179/ppp-loans-sba-paycheck-protection-program-polling-kanye-west>; Jonathan O'Connell, Andrew Van Dam, Aaron Gregg, and Alyssa Fowers, "More Than Half of Emergency Small-Business Funds Went to Larger Businesses, New Data Shows," *Washington Post*, December 2, 2020, <http://washingtonpost.com/business/2020/12/01/ppp-sba-data>.
38. Heather Long, Andrew Van Dam, Alyssa Fowers, and Leslie Shapiro, "The COVID-19 Recession Is the Most Unequal in Modern U.S. History," *Washington Post*, September 30, 2020, <http://washingtonpost.com/graphics/2020/business/coronavirus-recession-equality>.
39. "Philippine Economy Shrank at Record Pace in 2020, Outlook Gloomy," *Al Jazeera*, January 28, 2021, <http://aljazeera.com/economy/2021/1/28/philippine-economy-shrank-at-record-pace-in-2020-outlook-gloomy>; Shotaro Tani, "Indonesia Economy Shrinks in 2020 for First Time in Two Decades," *Nikkei Asia*, February 5, 2021, <http://asia.nikkei.com/Economy/Indonesia-economy-shrinks-in-2020-for-first-time-in-two-decades>; Press Trust of India, "Indian Economy Estimated to Contract by 9.6% in 2020, Grow at 7.3% in 2021: UN," *Indian Express*, January 26, 2021, <http://indianexpress.com/article/business/economy/indian-economy-estimated-to-contract-by-9-6-per-cent-in-2020-grow-at-7-3-per-cent-in-2021-un-7162196>.
40. "COVID-19 to Add as Many as 150 Million Extreme Poor by 2021," *World Bank*, October 7, 2020, <http://worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021>; Òscar Jordà, Sanjay R. Singh, and Alan M. Taylor, "The Long Economic Hangover of Pandemics," *Finance & Development* 57, no. 2 (June 2020), <http://imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/06/long-term-economic-impact-of-pandemics-jorda.htm>.
41. Ian Prates and Rogério J. Barbosa, "The Impact of COVID-19 in Brazil: Labour Market and Social Protection Responses," *Indian Journal of Labour Economics* 63 (September 10, 2020): 31–35, <http://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7482054>.
42. Kia Lilly Caldwell and Edna Maria de Araújo, "COVID-19 is Deadlier for Black Brazilians, a Legacy of Structural Racism That Dates Back to Slavery," *Conversation*, June 10, 2020, <http://theconversation.com/covid-19-is-deadlier-for-black-brazilians-a-legacy-of-structural-racism-that-dates-back-to-slavery-139430>.
43. Rajesh Roy and Vibhuti Agarwal, "Millions of Indians Are Fleeing Cities, Raising Fears of Coronavirus 'Land Mine' in Villages," *Wall Street Journal*, May 27, 2020, <http://wsj.com/articles/indias-migrants-head-home-as-lockdown-eases-prompting-fears-of-coronavirus-spread-11590579072>.
44. Hannah Ellis-Petersen and Shaikh Azizur Rahman, "Coronavirus Conspiracy Theories Targeting Muslims Spread in India," *Guardian*, April 13, 2020, <http://theguardian.com/world/2020/apr/13/coronavirus-conspiracy-theories-targeting-muslims-spread-in-india>.
45. Jeffrey Gettleman, Kai Shultz, and Suhasini Raj, "In India, Coronavirus Fans Religious Hatred," *New York Times*, April 12, 2020, <http://nytimes.com/2020/04/12/world/asia/india-coronavirus-muslims-bigotry.html>; Lauren Frayer, "Blamed for Coronavirus Outbreak, Muslims in India Come Under Attack," *NPR*, April 23, 2020, <http://npr.org/2020/04/23/839980029/blamed-for-coronavirus-outbreak-muslims-in-india-come-under-attack>; Asim Ali, "COVID an Excuse to Push Indian Muslims Out of Informal Sector Jobs. Apartheid the Next Step," *Print*, April 9, 2020, <http://theprint.in/opinion/covid-an-excuse-to-push-indian-muslims-out-of-informal-sector-jobs-apartheid-the-next-step/398236>.
46. Raksha Kumar, "Coronavirus: Lalitha, 1 of 260 Million Indians Sliding Back Into Poverty," *South China Morning Post*, June 16, 2020, <http://scmp.com/week-asia/economics/article/3089212/1-bag-us100-meet-lalitha-1-260-million-indians-sliding-back>.
47. Teresa Ghilarducci, "Most Americans Don't Have a Real Stake in The Stock Market," *Forbes*, August 31, 2020, <http://forbes.com/sites/teresaghilarducci/2020/08/31/most-americans-dont-have-a-real-stake-in-the-stock-market/?sh=59460d5d1154>.
48. Connor Maxwell and Danyelle Solomon, "The Economic Fallout of the Coronavirus for People of Color," *Center for American Progress*, April 14, 2020, <http://americanprogress.org/issues/race/news/2020/04/14/483125/economic-fallout-coronavirus-people-color>.
49. "Why America Has Done Such a Poor Job of Keeping Schools Open," *Economist*, January 23, 2021, <http://economist.com/united-states/2021/01/19/why-america-has-done-such-a-poor-job-of-keeping-schools-open>.
50. "Why America Has Done Such a Poor Job of Keeping Schools Open."

51. Michelle Fox, "Coronavirus Has Upended School Plans. It Will Also Worsen Racial and Economic Inequalities, Experts Warn," CNBC, August 12, 2020, <http://cnbc.com/2020/08/12/impact-of-covid-19-on-schools-will-worsen-racial-inequity-experts-say.html>;
- Emma Dorn, Bryan Hancock, Jimmy Sarakatsannis, and Ellen Viruleg, "COVID-19 and Student Learning in the United States: The Hurt Could Last a Lifetime," McKinsey & Company, June 1, 2020, <http://mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-student-learning-in-the-united-states-the-hurt-could-last-a-lifetime>.
52. See Eric A. Hanushek and Ludger Woessman, "The Economic Impacts of Learning Losses," Organisation for Economic Co-operation and Development, September 2020, <http://oecd.org/education/The-economic-impacts-of-coronavirus-covid-19-learning-losses.pdf>.
53. Richard C. Paddock and Dera Menra Sijabat, "When Learning Is Really Remote: Students Climb Trees and Travel Miles for a Cell Signal," *New York Times*, September 5, 2020, <http://nytimes.com/2020/09/05/world/asia/coronavirus-indonesia-school-remote-learning.html>.
54. Nicola Fuchs-Schündeln, Dirk Krueger, Alexander Ludwig, and Irina Popova, "The Long-Term Effects of School Closures," *Vox EU*, November 12, 2020, <http://voxeu.org/article/long-term-effects-school-closures>.
55. Joshua Kurlantzick, "Rodrigo Duterte Goes Even Farther in Using COVID-19 to Crack Down," *Asia Unbound* (blog), June 8, 2020, <http://cfr.org/blog/rodrigo-duterte-goes-even-farther-using-covid-19-crack-down>.
56. Jackson Diehl, "The Pandemic Is Killing Truth, Too," *Washington Post*, April 12, 2020 http://washingtonpost.com/opinions/global-opinions/truth-is-the-first-casualty-in-war-including-this-one/2020/04/12/44c5ea44-7a88-11ea-b6ff-597f170df8f8_story.html.
57. "Under a Lawless Trump, Our System of Checks and Balances Is Being Destroyed," *Washington Post*, September 18, 2020, <http://washingtonpost.com/opinions/2020/09/18/trump-law-checks-balances/?arc404=true>; Kimberly Wehle, "Congress Has Lost Its Power Over Trump," *Atlantic*, February 4, 2020, <http://theatlantic.com/ideas/archive/2020/02/checks-and-balances-trump-has-swept-away/606013>; Glenn C. Altschuler, "President Trump's Assault on Checks and Balances: Five Acts in Four Weeks," *Hill*, February 24, 2020, <http://thehill.com/opinion/white-house/484299-president-trumps-assault-on-checks-and-balances-five-acts-in-four-weeks>; Melissa Quinn, "The Internal Watchdogs Trump Has Fired or Replaced," CBS News, May 19, 2020, <http://cbsnews.com/news/trump-inspectors-general-internal-watchdogs-fired-list>; Becca Damante, "At Least 15 Trump Officials Do Not Hold Their Positions Lawfully," *Just Security*, September 17, 2020, <http://justsecurity.org/72456/at-least-15-trump-officials-do-not-hold-their-positions-lawfully>; Kyle Cheney, "Trump Calls on GOP State Legislatures to Overturn Election Results," *Politico*, November 21, 2020, <http://politico.com/news/2020/11/21/trump-state-legislatures-overturn-election-results-439031>.
58. Ronna Nirmla, "Scholars: Indonesia's Democratic Gains Eroding Under Jokowi," *BenarNews*, September 25, 2020, <http://benarnews.org/english/news/indonesian/democracy-09252020164503.html>; "Indonesian Politicians Are Giving the Armed Forces a Big Role in Government," *Economist*, November 2, 2019, <http://economist.com/asia/2019/10/31/indonesian-politicians-are-giving-the-armed-forces-a-big-role-in-government>; Ardila Syakriah, "Indonesian Military Deployed for Coronavirus Fight," *Jakarta Post*, September 21, 2020, <http://thejakartapost.com/news/2020/09/20/indonesian-military-deployed-for-coronavirus-fight.html>.
59. Eve Warburton, "Indonesia: Polarization, Democratic Distress, and the Coronavirus," in *Polarization and the Pandemic*, eds. Thomas Carothers and Andrew O'Donohue (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2020), <http://carnegieendowment.org/2020/04/28/indonesia-polarization-democratic-distress-and-coronavirus-pub-81641>; Joshua Kurlantzick, "How Jokowi Failed the Test of COVID-19 in Indonesia," *World Politics Review*, June 9, 2020, <http://worldpoliticsreview.com/articles/28823/amid-lackluster-response-by-jokowi-indonesia-reels-from-covid-19>.
60. "New Report: Democracy Under Lockdown—The Impact of COVID-19 on Global Freedom," Freedom House, October 2, 2020, <http://freedomhouse.org/article/new-report-democracy-under-lockdown-impact-covid-19-global-freedom>. Joshua Kurlantzick served as a consultant on rights in several Southeast Asian states for this report.
61. "Democracy Index 2020: In Sickness and In Health?," *Economist Intelligence Unit*, February 2, 2021, <http://eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020>.
62. Ashley Quarcoo and Rachel Kleinfeld, "Can the Coronavirus Heal Polarization?," Carnegie Endowment for International Peace, May 1, 2020, <http://carnegieendowment.org/2020/05/01/can-coronavirus-heal-polarization-pub-81704>.
63. Michael Taube, "A Crisis Can Forge Great Leaders. Doug Ford Is Showing That in Canada," *Washington Post*, April 7, 2020, <http://washingtonpost.com/opinions/2020/04/07/crisis-can-forge-great-leaders-doug-ford-is-showing-that-canada>.
64. Quarcoo and Kleinfeld, "Can the Coronavirus Heal Polarization?."
65. "New Zealand Election: Jacinda Ardern's Labour Party Scores Landslide Win," BBC, October 17, 2020, <http://bbc.com/news/world-asia-54519628>; Smith, "New Zealand's Jacinda Ardern Wins Big After World-Leading COVID-19 Response."
66. Thomas B. Edsall, "Is America Ungovernable Now?," *New York Times*, January 20, 2021, <http://nytimes.com/2021/01/20/opinion/joe-biden-inauguration.html>.
67. Jacob Hacker, "The Politics of Predistribution: Jacob Hacker Interviewed by Ben Jackson and Martin O'Neill," *Renewal* 21, no. 2–3 (Summer 2013).
68. Quarcoo and Kleinfeld, "Can the Coronavirus Heal Polarization?"; Jamie Ballard, "Two-Thirds of Americans Would Support Their State Instituting a One-Month COVID-19 Lockdown," *YouGov*, November 10, 2020, <http://today.yougov.com/topics/politics/articles-reports/2020/11/10/americans-support-covid-19-lockdowns>.

69. "The New Normal?," *More in Common*, September 2020, <http://moreincommon.com/newnormal>.
70. Abel Brodeur, Leonardo Baccini, and Stephen Weymouth, "How COVID-19 Led to Donald Trump's Defeat," *Conversation*, December 7, 2020, <http://theconversation.com/how-covid-19-led-to-donald-trumps-defeat-150110>; Leonardo Baccini, Abel Brodeur, and Stephen Weymouth, "The COVID-19 Pandemic and the 2020 U.S. Presidential Election," IZA Institute of Labor Economics, November 2020, <http://ftp.iza.org/dp13862.pdf>.
71. Ovetta Wiggins, "Maryland's Democrats Give High Marks to Hogan's Pandemic Response," *Washington Post*, May 26, 2020, http://washingtonpost.com/local/md-politics/marylands-democrats-give-high-marks-to-hogans-pandemic-response/2020/05/26/d9c86712-9f67-11ea-b5c9-570a91917d8d_story.html; Talia Richman, "Poll: Majority of Marylanders Surveyed Approve of Hogan's Response to the Coronavirus Pandemic," *Baltimore Sun*, October 13, 2020, <http://baltimoresun.com/politics/bs-md-pol-poll-approval-20201013-mbo4gunw2bck7kqglh6ftox6nu-story.html>; Mark Davis, "July 2020 VPR-Vermont PBS Poll: Big Support For Gov. Scott, Black Lives Matter and Masks," Vermont Public Radio, August 4, 2020, <http://vpr.org/post/july-2020-vpr-vermont-pbs-poll-big-support-gov-scott-black-lives-matter-and-masks#stream/0>; "Governor Scott Gets High Marks on COVID-19 Response," WCAX, July 15, 2020, <http://wcax.com/2020/07/15/governor-scott-gets-high-marks-on-covid-19-response>; Joe Sonka, "Poll Shows Rivals Andy Beshear and Daniel Cameron Both Remain Popular With Kentucky Voters," *Louisville Courier Journal*, October 22, 2020, <http://courier-journal.com/story/news/politics/2020/10/22/andy-beshear-daniel-cameron-both-popular-kentucky-poll-shows/3719450001>.
72. "Biden Announces a First Priority for a Biden Administration Will Be Comprehensive Reforms, as Reflected in H.R. 1," *Democracy 21*, April 17, 2020, <http://democracy21.org/news-press/press-releases/biden-announces-a-first-priority-for-a-biden-administration-will-be-comprehensive-reforms-as-reflected-in-h-r-1>; Kim Soffen, "How Racial Gerrymandering Deprives Black People of Political Power," *Washington Post*, June 9, 2016, <http://washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/06/09/how-a-widespread-practice-to-politically-empower-african-americans-might-actually-harm-them>; Olga Pierce and Kate Rabinowitz, "'Partisan' Gerrymandering Is Still About Race," *ProPublica*, October 9, 2017, <http://propublica.org/article/partisan-gerrymandering-is-still-about-race>.
73. Mary Papenfuss, "Michigan GOP Strips Lawmaker of Committee Posts After He Hints at Electoral Vote Violence," *HuffPost*, December 14, 2020, http://huffpost.com/entry/republican-gary-eisen-michigan-violence-electoral-vote_n_5fd7f53fc5b689a6230d2263.
74. Bill Spindle and Vibhuti Agarwal, "India Turns to Economic Overhaul as Growth Prospects Slide Amid Coronavirus," *Wall Street Journal*, October 13, 2020, <http://wsj.com/articles/india-turns-to-economic-overhaul-as-growth-prospects-slide-amid-coronavirus-11602586802>.
75. Matthew Yglesias, "Progressives Don't Love Joe Biden, But They're Learning to Love His Agenda," *Vox*, July 18, 2020, <http://vox.com/21322478/joe-biden-overton-window-bidenism>.
76. Heather Long, Alyssa Fowers, and Andrew Van Dam, "Biden Stimulus Showers Money on Americans, Sharply Cutting Poverty and Favoring Individuals Over Businesses," *Washington Post*, March 6, 2021, <http://washingtonpost.com/business/2021/03/06/biden-stimulus-poverty-checks>.
77. Justin H. Vassallo, "Populism After Trump," *American Prospect*, August 26, 2020, <http://prospect.org/politics/populism-after-trump-josh-hawley>.
78. Julius Krien, "Trump Needed the 'Boneheads' More Than He Knew," *New York Times*, December 7, 2020, <http://ny-times.com/2020/12/07/opinion/trump-populists-technocrats.html>.
79. Jack A. Goldstone and Peter Turchin, "Welcome to the 'Turbulent Twenties,'" *Noema*, September 10, 2020, <http://noe-mamag.com/welcome-to-the-turbulent-twenties>.
80. Spindle and Agarwal, "India Turns to Economic Overhaul as Growth Prospects Slide Amid Coronavirus."
81. Edmond Roy, "India's Farmers Take on Modi," *Interpreter*, December 2, 2020, <http://lowyinstitute.org/the-interpreter/india-s-farmers-take-modi>; Amy Kazmin, "Farmers' Strike Over Agricultural Reforms Paralyzes Indian Transport," *Financial Times*, December 8, 2020, <http://ft.com/content/57d27f6f-1a1a-4e20-9027-c27bdb515c0e>.
82. Joshua Kurlantzick, "A Controversial Omnibus Law Could Spell Trouble for Indonesia's Democracy," *World Politics Review*, December 11, 2020, <http://worldpoliticsreview.com/articles/29281/a-controversial-omnibus-law-could-spell-trouble-for-indonesian-democracy>.
83. Kurlantzick, *Addressing the Effect of COVID-19 on Democracy in South and Southeast Asia*.
84. This paper does not intend to make public health recommendations; however, addressing these states' political failures would improve pandemic readiness. For proposals on public health policy, see Council on Foreign Relations, *Improving Pandemic Preparedness: Lessons From COVID-19* (New York: Council on Foreign Relations, 2020).
85. Sarah Repucci and Amy Slipowitz, "Freedom in the World 2021: Democracy Under Siege," Freedom House, March 2021, <http://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege>. Joshua Kurlantzick serves as a contributor to several of the Asia sections of Freedom in the World.
86. Carothers and O'Donohue, *Polarization and the Pandemic*.